



MERAYAKAN GURU BANGSA

Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2017

Merayakan Guru Bangsa



Direktorat Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2017

Merayakan Guru Bangsa

Cetakan Pertama, Mei 2017, 100 hlm., 16.5 cm x 10.5 cm
ISBN: 978-602-1289-51-8

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Tlp. 021-
5725578/021-5725035

Penanggung Jawab

Direktur Jenderal Kebudayaan
Hilmar Farid

Pengarah

Direktur Sejarah
Triana Wulandari

Kasubdit Pembinaan Tenaga Kesejarahan
Saptari Novia Sari Stri

Koordinator Penerbitan & Editor

Mirwan Andan

Penulis

Ananto Kusuma Seta, Neng Dara Affiah
Noer Fauzi Rachman, Setyo Ramadi

Periset Arsip

Barak Aziz Malinggi

Penata Letak dan Perancang Sampul

George M.D., Sutradani Lebu

Percetakan

Serpico Printing Utama (Panel Barus, Pungky Maylina)

Gambar Sampul: Ki Hajar Dewantara (kiri berdas) bersama para pendidik dan anak didik pada masa permulaan Perguruan Taman Siswa berdiri pada 1922 (sumber foto: Perpunas).

Daftar Isi

Kata Pengantar Triana Wulandari	6
Menguatkan Pendidikan Karakter: Tugas Guru Abad XXI Ananto Kusuma Seta	8
Ketika Sekolah Mengajarkan Ilmu Pergi, Bagaimana Para Pandu Tanah Air Menyikapinya? Noer Fauzi Rachman	24
Membangun Daya Padu Setyo Ramadi	50
Gerakan Perempuan Muslim Sebagai Gerakan Pendidikan Neng Dara Affiah	80

KATA PENGANTAR

Setiap tahun di Indonesia, sejak 1960, 2 Mei diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Jika 17 Agustus adalah hari kemerdekaan dan diperingati secara nasional untuk menggelorakan semangat kemerdekaan dari belenggu penjajah, maka hari pendidikan nasional ini perlu diberi makna lebih, digaungkan sebagai hari penting bagi dunia pendidikan di Indonesia, bukan hanya sekedar prosesi seremonial berupa upacara, ada pidato, lalu setelah itu selesai tanpa jejak nyata.

Pengalaman Ki Hajar Dewantara yang telah menceburkan diri dalam kancah pendidikan karena beliau menilai kolonialisme akan terus ada di dunia ini dalam berbagai bentuk dan alasan yang menyertainya. Penguasaan negara atas negara lain, penguasaan bangsa atas bangsa lain, penguasaan umat beragama terhadap umat beragama lain, dan bentuk-bentuk semacam itu tidaklah tepat bagi Indonesia yang telah memilih jalan demokrasi dalam menjalankan kehidupan bernegaranya. Dalam satu kesempatan Ki Hajar Dewantara mengatakan, bahwa "Keadaan yang berjiwa kolonial itu tidak akan lenyap, jika hanya dilawan dengan pergerakan politik saja. Oleh karena itu janganlah kita hanya melulu mementingkan perlawanan terhadap pada luar saja, akan tetapi harus juga mementingkan menyebar benih hidup merdeka di kalangan rakyat kita sendiri dengan jalan pengajaran, yang disertai Pendidikan nasional".

Tahun ini, Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud, menyelenggarakan perhelatan *Merayakan Guru*

Bangsa: Guru Mulia Karena Karya. Tema tersebut adalah tema turunan dari tema besar Kemendikbud dalam merayakan hari pendidikan nasional tahun ini yang berbunyi: *Percepatan Pendidikan yang Merata dan Berkualitas.* Tema tersebut sangat penting dan relevan mengingat saat ini, percepatan pemerataan pendidikan berkualitas adalah salah satu program prioritas pemerintah, dan guru adalah elemen sangat utama dalam upaya tersebut. Tema *Merayakan Guru Bangsa: Guru Mulia Karena Karya* didedikasikan kepada perjuangan Ki Hadjar Dewantara atas upayanya berkarya sepanjang hidup bagi pendidikan nasional, terutama melalui Taman Siswa. Harapannya, program ini bisa menginspirasi banyak orang, sehingga akan lahir Ki Hadjar-Ki Hadjar berikutnya yang bekerja tanpa henti untuk memajukan pendidikan nasional di Indonesia.

Penerbitan buku *Merayakan Buku Bangsa* ini dan seluruh rangkaian acara *Merayakan Buku Bangsa: Guru Mulia Karena Karya* sama sekali bukanlah glorifikasi terhadap sosok Ki Hadjar Dewantara semata, seperti disebutkan di atas, tapi sebagai upaya untuk membuka lembaran sejarah, untuk menegaskan cita-cita kita bersama dalam memperkuat upaya pendidikan karakter yang menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Akhir kata, semoga buku ini berguna bagi kita semua dan selamat membaca.

Triana Wulandari

Direktur Sejarah
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MENGUATKAN PENDIDIKAN KARAKTER: TUGAS GURU ABAD XXI

Ananto Kusuma Seta

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bidang Inovasi dan Daya Saing

“Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelekt) dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak kita “ (Ki Hadjar Dewantara).

Orientasi pendidikan adalah masa depan. Pada pertengahan tahun 600an, Ali bin Abi Thalib telah mengingatkan : “Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi tantangan masa depan yang berbeda dengan zamanmu”. Pertanyaannya adalah, seperti apa tantangan masa depan itu, kecakapan apa yang harus dibekalkan kepada siswa agar bisa menghadapi tantangan itu, dan bagaimana mendidikan kecakapan itu?

Paling sedikit ada empat tantangan yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya digunakan untuk merumuskan kecakapan apa yang perlu dibekalkan kepada siswa untuk sukses di masa depan. Pertama adalah globalisasi, yang memungkinkan lalu lalang orang, barang, jasa

dan informasi tanpa mengenal batas geografis. Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai akhir 2015, misalnya, akan memungkinkan peningkatan mobilitas dan persaingan tenaga kerja secara bebas antar sesama negara anggota ASEAN. Diperkirakan pada 2025 mobilitas tenaga kerja antara negara anggota ASEAN sekitar 14,2 juta orang.

Globalisasi tidak saja menghadirkan lalu-lalang manusia, namun juga budaya dan peradaban dari berbagai penjuru dunia. Di sinilah sering terjadi benturan karena adanya perbedaan budaya dan peradaban (*class of civilization*) antar suku, ras dan bangsa. Nilai-nilai karakter apa saja yang harus dipunyai siswa untuk menghadapi globalisasi? Bagaimana sekolah harus membekali siswa menjadi warga global (*global citizen*), yang bisa diterima oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja namun tanpa kehilangan identitas kelIndonesiaannya? Bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang bisa *go global* sekaligus bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri?

Kedua adalah Revolusi Industri keempat yang baru saja hadir. Revolusi Industri telah menjadi pendorong utama perubahan peradaban manusia. Ditemukannya mesin uap pada era 1760an adalah tonggak sejarah dimulainya Revolusi Industri pertama yang mengubah cara manusia bekerja dari semula menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi menggunakan mesin. Kurang dari seratus tahun kemudian lahir Revolusi Industri



Pendiri Indische Partij (duduk) Dr. Cipto Mangunkusumo, Dr. Ernest François Eugène Douwes Dekker, R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 1913. (Sumber: Perpusnas)

kedua pada tahun 1880an dengan ditemukannya listrik, yang merubah aktivitas kehidupan manusia dalam menggunakan energy. Revolusi Industri ketiga lahir pada 1970an yang ditandai dengan lahirnya teknologi informasi yang mengubah cara orang berkomunikasi dan lahirnya otomasi industri.

Sekarang kita memasuki Revolusi Industri ke-4 yang bertumpu pada *cyber physical system* yang akan mengubah secara radikal cara manusia berkehidupan, bekerja dan berkomunikasi. Inovasi yang dihasilkan untuk membuat kehidupan lebih nyaman tidak terbatas, namun tantangan yang harus dipecahkan juga sangat kompleks. Pekerjaan yang semula dilakukan manual dan hanya mengandalkan kognitif semata sudah mulai digantikan oleh mesin/robot dan teknologi informasi. Hanya dengan menggunakan gawai, misalnya, orang sudah beli tiket dan *check-in* pesawat, memesan barang dan jasa, serta melakukan pembayarannya tanpa perlu pergi ke toko atau *counter*. Karena itu, berbagai jenis pekerjaan bersifat rutin secara perlahan akan hilang pada 10 tahun ke depan. Diperkirakan 35% keterampilan dasar akan hilang pada tahun 2020, digantikan oleh jenis-jenis pekerjaan baru yang belum bisa kita bayangkan.

Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita harus mendidik siswa untuk jenis pekerjaan yang mungkin sekarang belum ada, menggunakan teknologi yang mungkin sekarang belum diciptakan, untuk memecahkan masalah-masalah yang mungkin sekarang belum muncul.

Bagaimana pendidikan dan kebudayaan dapat menjadi wahana bagi siswa untuk mempersiapkan dirinya?

Ketiga adalah pemenuhan kebutuhan domestik Indonesia, yaitu melahirkan generasi emas 2045 dengan memanfaatkan momentum bonus demografi. Generasi baru yang mampu merawat persatuan dalam kebhinekaan Indonesia dengan kokoh dan sekaligus menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bangsa. Generasi yang mampu menjadikan anugerah kekayaan keragaman alam dan budaya sebagai motor daya saing yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan ekonomi nomer 5 dunia pada tahun 2045. Untuk itu tugas kita adalah bagaimana bisa menyiapkan generasi yang memiliki kebanggaan dan kecintaan sebagai warga negara Indonesia. Nilai-nilai apa saja yang harus ditanamkan pada generasi emas 2045?

Keempat adalah hadirnya generasi milenial Indonesia. Berbeda dengan generasi sebelumnya, generasi milenial adalah generasi yang cerdas, pembelajar cepat, dan pengguna aktif sosial media. Pada 2016 saja sudah sekitar 70% para siswa menggunakan internet. Mereka mendambakan fleksibilitas dan kebebasan untuk bekerja di masa saja, kapan saja dan dengan siapa saja. Mereka adalah generasi yang sangat suka melakukan eksplorasi. Pertanyaannya adalah bagaimana mendidik mereka ini yang mayoritas berkeinginan pembelajaran menggunakan teknologi. Mereka juga

menginginkan pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dengan memberi kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat dan mendambakan pekerjaan rumah yang menantang dan bisa menumbuhkan bakatnya.

Karakter Adalah Ruh Kecakapan Abad 21

Dengan melihat tantangan yang sangat besar di atas, kecakapan apa saja yang harus dididikkan kepada siswa untuk menjadi generasi yang memenangkan persaingan abad 21? Ki Hadjar Dewantoro telah menempatkan karakter (budi pekerti) pada urutan pertama dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan. Karakter diperlukan untuk memampukan siswa bisa menghadapi lingkungan yang beragam dan terus menerus berubah.

Ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas pada setiap siswa. Kelima nilai utama karakter bangsa itu adalah *Religius, Nasionalis, Gotong Royong, Mandiri, dan Integritas* yang berfungsi sebagai pondasi dan kompas bagi siswa (Gambar 1). Nilai-nilai yang diambil dari falsafah hidup bangsa dan tujuan bernegara Indonesia ini mengarahkan siswa bisa membedakan benar dan salah dan menuntun menentukan pilihan dalam mengembangkan dirinya, serta membantu lebih siap menjadi warga rumah tangga, lokal, nasional dan global.

5 Nilai Utama Karakter

Religius

Siswa yang sadar sebagai makhluk Tuhan TME yang harus beriman, menebar kasih sayang, menjunjung toleransi, kerukunan, dan kedamaian, serta menjadi rahmat seluruh alam.

Nasionalis

Siswa yang cinta sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung persatuan dalam kebinekaan, keadilan dan keadaban, mencerdaskan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum dan ikut menjaga perdamaian dunia.

Gotong Royong

Siswa yang bangga bisa bekerjasama saling tolong menolong dalam kebaikan, mengambil inisiatif untuk berempati dan bahu membahu menyelesaikan masalah bersama tanpa diskriminasi.

Mandiri

Siswa yang bangga dengan hasil karyanya sendiri, bangga dengan kegigihan, kerja keras, keberanian, optimisme dan ketangguhan dirinya untuk terus belajar guna meraih mimpi dan cita-citanya.

Integritas

Siswa yang bangga bisa menjunjung moral kejujuran menghargai orang lain, dan menjadi pemimpin yang terpercaya.

Gambar 1.

Lima Nilai Utama Karakter
Sebagai Kompas Pengembangan Pendidikan

Kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri dan berkembang sendiri-sendiri melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun pendidikan karakter dimulai, individu dan seolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama lainnya baik secara kontekstual maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Y.M.E. diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dan dalam bentuk kehidupan sebagai kelompok, masyarakat, maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai-nilai karakter, nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya.

Setelah karakter, tujuan kedua dari penyelenggaraan pendidikan adalah memajukan bertumbuhnya intelektualitas, yakni kompetensi dan keterampilan literasi. Kompetensi menggambarkan kemampuan siswa bisa menghadapi dan menyelesaikan tantangan yang kompleks dengan lima keterampilan, yakni berpikir *kritis*, *kreativitas*, *kolaborasi*, *komunikasi*, dan *inovasi*. Keterampilan berpikir kritis, misalnya, adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisa dan mengevaluasi



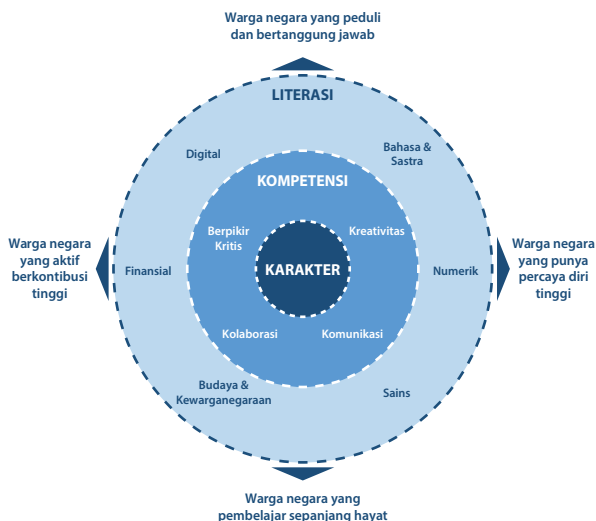
Foto Ki Hajar Dewantara bersama istri Ny. Sutartinah dan putri sulungnya Niken Wandansari Asti (umur 1 tahun) pada 1916. (Sumber: Perpunas)

ide dan informasi untuk merespon permasalahan. Kreativitas adalah kemampuan untuk menemukan kebaruan untuk mengatasi masalah dengan menggunakan, mensintesa atau memanfaatkan pengetahuan dan teknologi. Komunikasi dan kolaborasi meliputi bekerja dalam koordinasi dengan orang lain dalam penyampaian informasi atau pemecahan masalah. Kompetensi semacam ini esensial dalam ketenagakerjaan abad 21, di mana kemampuan untuk dapat mengevaluasi secara kritis, menyampaikan pengetahuan, serta dapat bekerja dengan baik dalam tim telah menjadi suatu norma.

Literasi dasar mempresentasikan bagaimana peserta didik mengaplikasikan keterampilan inti pada kegiatan sehari-hari. Keterampilan-keterampilan ini bertindak sebagai fondasi di mana peserta didik akan membentuk lebih banyak kompetensi dan kualitas karakter yang lebih maju. Literasi tidak hanya meliputi keterampilan yang lazim dikenal secara global seperti kemampuan baca dan sastra dan numerasi, melainkan juga literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewarganegaraan.

Karakter, kompetensi dan literasi adalah 3 komponen yang saling berhubungan erat dan tidak bisa dipisahkan sebagai pembentuk kecakapan abad 21 yang terus menerus harus diasah melalui pembelajaran sepanjang hayat (life long learning). Karakter adalah ruh kecakapan abad 21.

Penguasaan literasi tidak akan mungkin terjadi jika siswa tidak punya dasar kompetensi yang kokoh dan penguasaan kompetensi akan ditentukan kekuatan karakter yang dimiliki siswa. Kecakapan abad 21 tersebut telah menjadi fokus sedang menjadi fokus dalam pembangunan pendidikan Indonesia untuk menghasilkan warga negara yang peduli dan bertanggungjawab, warga negara yang aktif berkontribusi dalam kemajuan, warga negara yang punya percaya diri tinggi, dan warga negara yang pembelajar sepanjang hayat (Gambar 2).



Gambar 2. Karakter Sebagai Ruh Pembentuk Kecakapan Abad 21 dan *Outcome* Pendidikan

Bagaimana Guru Harus Memperkuat Pendidikan Karakter

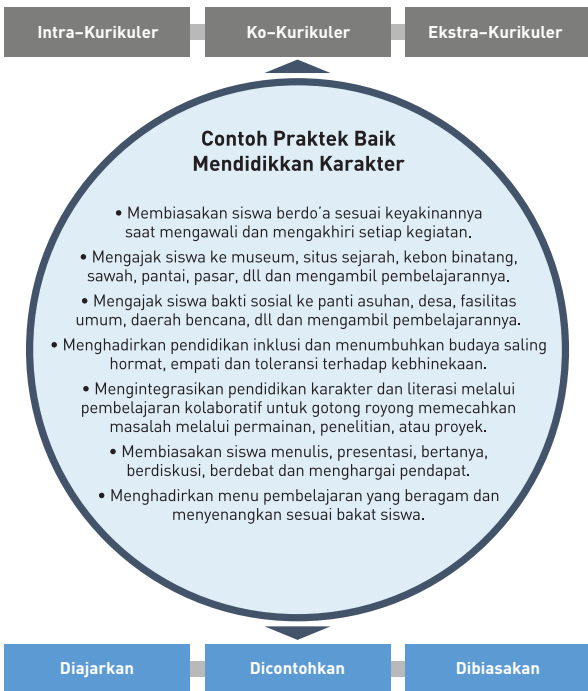
Pendidikan karakter, kompetensi, dan literasi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena itu, pendidikan karakter tidak dilakukan secara tersendiri, namun dengan beragam cara. Beberapa diantaranya adalah harus terintegrasi dengan mata pelajaran yang ada di dalam struktur kurikulum dan mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) melalui kegiatan intra kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler sesuai karakteristik peserta didik, kearifan lokal, daya dukung yang dimiliki (kontekstual). Sebagai kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, setiap guru harus menyusun dokumen perencanaan pembelajaran berupa Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai mata pelajarannya masing-masing. Nilai-nilai utama yang akan dikembangkan/diperkuat pada sesi pembelajaran tersebut dan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing.

Pada kegiatan ekstrakurikuler, satuan pendidikan melakukan penguatan nilai-nilai karakter melalui berbagai kegiatan, Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan masyarakat yang relevan. Pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter dimaksudkan untuk menumbuhkan dan memperkuat pengetahuan, menanamkan kesadaran, dan mempraktikkan nilai-nilai utama PPK. Pendidik dapat memanfaatkan secara optimal materi yang sudah tersedia di dalam kurikulum secara kontekstual dengan penguatan nilai-nilai utama karakter.

Guru adalah kunci utama suksesnya pendidikan karakter. Untuk itu, guru harus kreatif dan mampu menghadirkan pembelajaran yang beragam, menyenangkan, dan menggairahkan dalam memberikan pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan peserta didik. Pengintegrasian pendidikan karakter dengan penguatan empat kompetensi dan enam literasi dasar harus dilakukan. Salah satu contoh metode pembelajaran kontekstual yang bisa dipilih adalah metode pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), yaitu pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media dalam proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penekanan pembelajaran terletak pada karakter kemandirian, kreativitas, berfikir kritis, kolaborasi dalam tim, dan komunikasi melalui presentasi, diskusi dan debat hasil proyek yang disajikan. Beberapa contoh praktek baik dapat dilihat dalam Gambar 3.

Pendidikan karakter di sekolah bukan sesuatu yang baru, namun sudah mulai dikerjakan pada 2010. Penguatan pendidikan karakter ke depan mutlak dilakukan karena terkait erat dengan pembentukan kompetensi dan penguatan literasi untuk mengembangkan kecakapan abad 21. Karena itu, penguatan pendidikan karakter harus melalui gerakan dan disinergikan dengan Gerakan Literasi nasional (GLN) yang tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, namun juga di keluarga dan masyarakat. Literasi tidak hanya diajarkan, namun juga harus dicontohkan dan dibiasakan. Dengan

cara demikian akan menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia. Dengan cara itu pula dunia pendidikan Indonesia akan mampu menghadirkan Generasi Emas 2045 berketerampilan abad 21 yang mampu menjawab tantangan zaman depan dan membawa Indonesia lebih maju dan sejahtera. Semoga.



Gambar 3.
Contoh Praktek Baik Mendidikan Karakter di Sekolah.





Noto Soeroto dan Suwardi Suryaningrat menari bersama di Den Haag pada Maret 1916. (Sumber: Perpunas)

Ketika Sekolah Mengajarkan Ilmu Pergi, Bagaimana Para Pandu Tanah Air Menyikapinya?

Noer Fauzi Rachman

Staf Khusus, Kantor Staf Presiden

I

Saya masih terngiang-ngiang dengan pertemuan kami dengan Petrus Almet 67 tahun, seorang tokoh adat dari Lelobatan, Molo Selatan, Timor Tengah Selatan (TTS), pada tanggal 8 dan 9 April 2017. Setelah sampai di rumahnya tengah malam, kami menerima sajian siri pinang, dan memulai bertukar kabar dan bercakap-cakap melepas rasa kerinduan setelah lebih 10 tahunan tidak bertemu. Topiknya mengalir begitu saja, termasuk mengenai rumah yang tidak banyak berubah, pohon-pohon pinangnya yang menjulang tinggi, rumah bulat yang multi fungsi, jumlah kuda-kudanya yang 400 ekor, hingga perjuangan mempertahankan wilayah adat.

Perihal topik yang terakhir ini, ada rasa bangga dan kagum mengenai jangka panjang dari perjuangan Petrus Almet, mama Aleta Baun dan para tetua adat Molo. Betapa mengagumkan mendengar cerita-cerita mereka, yang sesungguhnya layak ditulis menjadi novel atau naskah skenario film. Saya merasa diistimewakan bisa mendengar tutur kisah para pejuang tanah air langsung dari tetua adat yang dihormati orang Molo ini, di dini hari.

Hingga kami minta ijin untuk tidur di rumah yang selalu tersedia untuk para tamu.

Setelah berkemas untuk tidur, saya mengingat kembali apa-apa yang telah kami lalui, mensyukurinya yang sudah kulalui, dan hadir satu pertanyaan mengenai siapa dari generasi muda selanjutnya yang akan mengisi kepemimpinan adat berikutnya?

Lalu, saya tertidur dengan selimut pertanyaan itu.

Saya bangun pagi, selesaikan upacara rutin pagi-pagi menyambut terbit matahari, dan berkemas-kemas untuk bertemu dengan Petrus Almet. Ketika sarapan pagi, percakapan berlanjut, yang pada gilirannya saya ajukan pertanyaan yang mengganggu semalam. Petrus Almet membenarkan masalah besar berkenaan dengan situasi pemuda adat mereka, yang tidak lagi mau urus pertanian, peternakan dan kerja-kerja menjaga budaya seperti yang mereka kerjakan.

“Pemuda sekarang maunya *urus oto* atau jadi tukang ojek.”

“Perempuan yang sekolah tak lagi bisa menenun.”

Saya tiba pada pertanyaan kunci untuk periksa siapakah sekarang pemuda (dan pemudi) yang mempelajari adat dan pada gilirannya mampu menggantikan tetua-tetua adat?



Masa permulaan Taman Siswa yang didirikan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta tanggal 3 Juli 1922. (Sumber: Perpunas)

II

Saya menjadi ingat pada puisi Sajak Pemuda yang dibuat Rendra, seorang penyair ternama Indonesia, di tahun 1996, dua puluh tahun lalu. Mari kita baca dengan penghayatan cuplikannya:

“Pendidikan negeri ini berkiblat ke Barat.
Di sana anak-anak memang disiapkan
untuk menjadi alat dari industri.
Dan industri mereka berjalan tanpa
berhenti.
Tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa?
Kita hanya menjadi alat birokrasi!
Dan birokrasi menjadi berlebihan
tanpa kegunaan
menjadi benalu di dahan.
Gelap. Pandanganku gelap.
Pendidikan tidak memberi pencerahan.
Latihan-latihan tidak memberi pekerjaan.
Gelap. Keluh kesahku gelap.
Orang yang hidup di dalam pengangguran.
Apakah yang terjadi di sekitarku ini?”
(Rendra, 1996).

Siapakah yang sekarang baca puisi itu? Bacalah satu lagi, cuplikasi dari puisi Rendra *Sajak Seonggok Jagung*, yang dibuatnya pada 1996 juga.

“Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda
yang pandangan hidupnya berasal dari

buku,
dan tidak dari kehidupan.
Yang tidak terlatih dalam metode,
dan hanya penuh hafalan kesimpulan,
yang hanya terlatih sebagai pemakai,
tetapi kurang latihan bebas berkarya.
Pendidikan telah memisahkannya dari
kehidupan.

Aku bertanya :

Apakah gunanya pendidikan
bila hanya akan membuat seseorang
menjadi asing

di tengah kenyataan persoalannya ?

Apakah gunanya pendidikan
bila hanya mendorong seseorang
menjadi layang-layang di ibukota
kikuk pulang ke daerahnya ?

Apakah gunanya seseorang
belajat filsafat, sastra, teknologi, ilmu
kedokteran,
atau apa saja,

bila pada akhirnya,
ketika ia pulang ke daerahnya, lalu berkata
:

Di sini aku merasa asing dan sepi !”

(Rendra, 1996).

III

Apa yang sedang terjadi dan mau kemana semua ini? Apakah yang menyebabkan dunia pedesaan, termasuk wilayah-wilayah adat, bukanlah menjadi tempat berangkat dan sekaligus tujuan pengabdian para pemuda-pemudi?

Salah satu jawabannya, karena sekolah telah mengajarkan ilmu-ilmu yang membuat pemuda-pemudinya pergi. Semakin tinggi tingkat sekolah orang-orang desa, semakin kuat pula aspirasi, motif dan dorongan mereka untuk meninggalkan desanya. Desa ditinggalkan pemuda-pemudi yang pandai, untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Semua itu akibat aspirasi, motif dan dorongan untuk punya suatu cara dan gaya hidup baru perkotaan modern, yang dianggap sebagai keniscayaan yang harus ditempuh. Pemuda-pemudi desa sekarang ini telah dan sedang menganut ideologi bahwa tenaga kerja manusia adalah komoditi, barang yang diperdagangkan. Kota menjadi daya tarik, magnet yang luar biasa. Badan mereka di desa, tapi imajinasinya hidup di kota-kota. Lulusan sekolah menjadi tenaga kerja urban. Mereka berpikir, dan bertindak yang berbeda secara total dengan orang tua mereka.

Pada gilirannya, mereka inilah yang semakin memenuhi kota-kota kabupaten, provinsi dan metropolitan. Migrasi ke kota-kota dan pertumbuhan kota semakin dipadati oleh orang-

orang dari desa. Mereka dari desa yang terdidik dan berhasil menjadi kelas menengah di kota-kota tidak kembali ke desa. Mereka menjadi bagian dari penduduk konsumtif, dengan membeli tanah dan/atau rumah untuk tinggal di pinggiran kota, serta motor dan mobil baru untuk transportasi, yang pada gilirannya membuat infrastruktur jalan di kota-kota provinsi dan metropolitan tidak lagi memadai. Di kota-kota metropolitan, terjadi macet di mana-mana setiap pagi pada jam pergi menuju pusat kota dan jam pulang menuju pinggiran kota.

Kesempatan kerja di sektor pertanian semakin sempit dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Minat bekerja pada bidang pertanian juga semakin menipis. Banyak sekali lapisan orang miskin di pedesaan, yang mayoritas tidak bertanah dan tidak bisa menikmati sekolah tinggi, harus mengambil risiko dengan memilih pergi ke luar desa untuk mendapatkan pekerjaan melalui kerja migran di kota-kota provinsi, metropolitan hingga ke luar negeri. Sebagian besar rakyat pekerja migran ini sesungguhnya berhasil memperoleh upah kerja yang lebih baik, mengirimkan pendapatannya ke desa, dan kemudian menjadi daya tarik bagi pemuda-pemudi desa generasi berikutnya untuk mengikuti jejak langkah mereka. Anehnya, pengalaman pahit hidup kerja sebagai migran, mulai kondisi kerja yang tidak layak, penipuan, diskriminasi hingga kekerasan, umumnya dipersepsi sebagai nasib buruk yang tidak mampu mencegah rombongan lain untuk pergi.

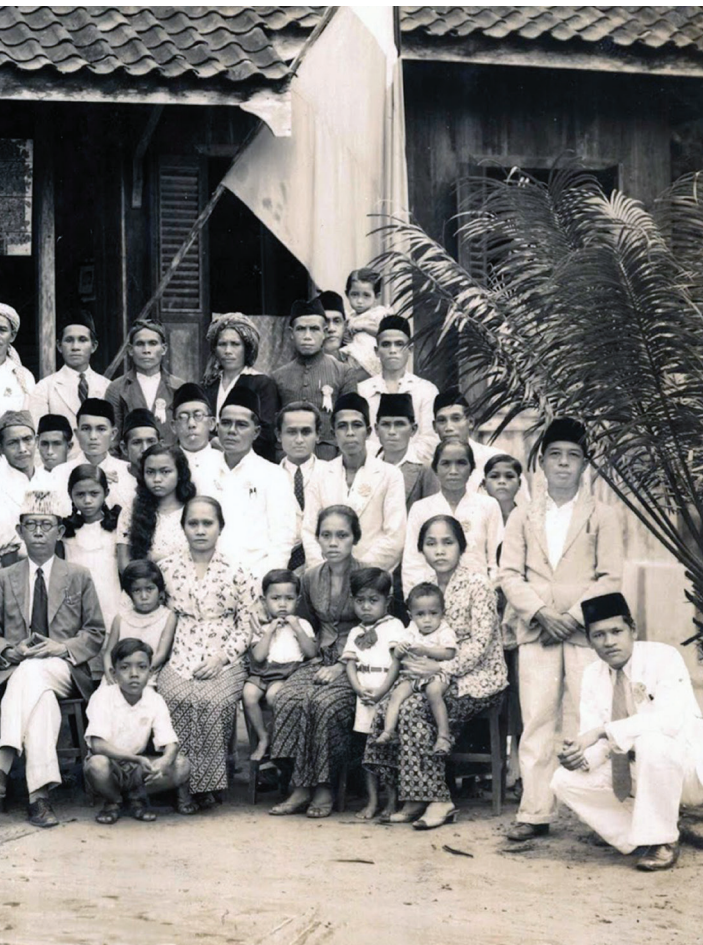
Di pihak lain, kita menyaksikan tanah, wilayah dan sumber daya alam di desa-desa diincar sebagai kapling-kapling perusahaan-perusahaan yang bergerak di usaha perkebunan, kehutanan hingga pertambangan, dengan memperoleh ijin-ijin yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dan penyingkirkan dan meminggirkan rakyat agraris (petani, nelayan, masyarakat adat yang mengumpulkan hasil hutan/laut, dan sebagainya) dari tanah dan ruang hidupnya. Perusahaan penghasil komoditas global itu membentuk sirkuit rantai komoditas global mulai dari saat diproduksinya hingga sampai ke konsumen, yang diperantarai oleh ragam macam proses dengan motif efisiensi mencari keuntungan. Kepemilikan dan tataguna lahan kampung, ladang, sawah, hutan, sungai, dan pantai telah, sedang dan akan terus diubah oleh industri pengerukan (batu bara, timah, nikel, pasir besi, bauksit, emas, semen, marmer, dsb), industri *pulp* and paper, industri perkebunan (kelapa sawit dll.), industri perumahan dan turisme, industri manufaktur, dan lain sebagainya. *Resultante* kekuatan mereka menciptakan kelompok-kelompok pekerja yang dengan sukarela maupun terpaksa siap sedia didisiplinkan untuk menjadi penggerak sistem produksi kapitalis itu





Ki Hajar Dewantara (kiri berdasi) bersama para pendidik dan anak didik pada masa permulaan Perguruan Taman Siswa berdiri pada 1922. (Sumber: Perpunas)





Ki Hajar Dewantara bersama siswa perguruan Taman Siswa Pangkal Pinang yang didirikan 5 Juni 1935.
(Sumber: Perpusnas)

IV

Bagaimana membuat 'sekolah' yang tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang membuat siswa pergi dari tanah airnya?

Hubungan guru-murid. Yang pertama-tama musti dipegang erat-erat bahwa yang disebut guru-murid tidak selalu dalam hubungan di sekolah dan di dalam kelas. Dalam cerita mengenai perjuangan wilayah adat, tetua adat dapat menjadi guru bagi mereka yang hendak mempelajari bagaimana pengetahuan, keahlian dan seni memimpin. Banyak hal yang perlu dipelajari pemuda-pemudi yang belajar mengenai kepemimpinan adat. Kita musti memikirkan dan mengusahakan bagaimana membuat hubungan murid dan gurunya sekaligus sebagai suatu hubungan yang terbentuk karena sama-sama terpanggil untuk merawat wilayah adatnya sebagai tanah air dari rakyat.

Mengalami sendiri. Berilah kesempatan pemuda-pemudi yang terpanggil merawat dan mengurus wilayah adatnya sebagai tanah airnya, suatu ikatan batin melalui pengalaman-pengalaman baru, misalnya dengan cara mengunjungi, bertapa, menziarahi dan bergaul dengan tanah, air, batu, pohon dan tanam-tanaman, binatang, iklim, pemandangan dan sebagainya. Ziarahilah satu-per-satu mereka, dan jadikan diri mereka terus bercakap-cakap dengan alam secara mendalam



Foto suasana Taman Siswa Jakarta pada 1946. (Sumber: Perpusnas)

Analisis sosial. Kita tidak bisa sekedar berfikir dalam batas lokal. Banyak sumber-sumber kekuatan pencipta masalah merupakan hasil dari kekuatan yang datang dari luar dan menjadi penguasa/kekuatan lokal. Ajaran-ajaran mengenai pengkaplingan tanah dan sumber daya alam, dan kemudian jadi bahan mentah untuk menghasilkan komoditas, musti dipelajari secara kongkrit siapa penganutnya, bagaimana ajaran itu disebarluaskan, dan bagaimana akibat ajaran tersebut terhadap tanah air tempat tinggal kita? Bisa jadi, memang sudah sedemikian lama ajaran itu melekat di dalam praktek para penguasa setempat, dan rakyat didisplinkan oleh menjadi pekerjanya, atau diharuskan rela menerima akibat-akibatnya. Kapankah hal itu mulainya, dan bagaimana cara ajaran itu mengejawantah jadi kongkrit di tempat itu. Kekuatan-kekuatan apa yang memungkinkan berwujud demikian itu. Apa hubungan kekuatan-kekuatan itu dengan sekolah yang ada di kampung itu. Sekolah bisa jadi berfungsi menjadi saluran transmisi ajaran-ajaran itu, atau justru secara kritis menandinginya. Selidiki pula bagaimana guru-guru dan murid-murid menempatkan diri dalam situasi kesenjangan antara cita-cita dan praktek serta efek yang ditimbulkannya itu.

Hubungan guru-murid-pokok bahasan. Hasil penyelidikan itu perlu dikodifikasi menjadi tema-tema yang bisa sanggup menggerakkan kesadaran kritis bersama. Yang diperlukan adalah memeriksa secara kongkrit dengan cara berdialog mengenai situasi eksistensial yang mereka hadapi,

untuk menemukan tema-tema yang mampu menggerakkan perubahan pandangan dan praktek mereka. Kita tidak bisa menyerah dengan menerima begitu saja situasi yang dihadapi dan tidak ada pilihan kecuali bahwa kita tinggal menyesuaikan diri saja pada kurikulum yang tersembunyi (hidden curriculum) yang ditanam ke guru-guru dan murid-murid. Guru dan murid, dan hubungan guru-murid yang diperantarai oleh pokok bahasan, harus dihubungkan dengan situasi tanah air. Panggilan tanah air harus dihidupkan, ditumbuhkan, dikembangkan dan dibesarkan sebagai panggilan ideologis melalui kegiatan-kegiatan praktis dalam hubungan guru-murid.

Sejarah geografi lokal. Yang perlu adalah pemahaman sejarah geografi lokasi tempat tanah air rakyat yang khusus. Yang sering diajarkan dalam buku-buku pelajaran adalah perjalanan negara-bangsa pada tingkat nasional yang melindasi zaman dari feodalisme, kolonialisme, hingga masa perjuangan kemerdekaan, dan rejim-rejim penguasa paska kolonial. Sesungguhnya pembabakan sejarah geografi lokal bisa dibuat sendiri, tidak perlu mengikuti babak-babak nasional. Lakukanlah wawancara dengan para tetua adat agar bisa didapat informasi mengenai sejarah geografi, babak-babak sejarah puluhan hingga ratusan tahun, perjalanan kampung/wilayah adat. Tugaskan kelompok-kelompok siswa untuk dapat temukan narasi sejarah lokal menurut masing-masing tetua hingga bisa dikodifikasi dan dilihat hubungannya dengan garis waktu (time-line)

di aras nasional. Lokal bukan sekedar merupakan akibat dari kebijakan dan kekuatan yang bergerak di atas lokal (supra local) hingga nasional, tapi lokal juga memiliki dinamika pertarungan kekuatannya sendiri, yang perlu dihubungkan dengan kekuatan supra lokal itu.

Menu-menu makanan. Dari menu-menu makanan lokal rakyat, bisa dilatihkan pelajaran masak-memasak, dengan menelusuri asal-usul dari bumbu-bumbu lokal dan apa saja bahan baku untuk berbagai menu masakan. Bayangkanlah, tiap siswa belajar yang secara langsung menuliskan menu makanan dari ahli pemasak-nya di kampung, menuliskan menunya, hingga tata cara memasak dan penyajiannya. Dengan mengenali menu-menu lokal, dan memasak makanan lokal, pemuda-pemudi bisa mempunyai ikatan dengan apa yang dihasilkan dari wilayah tanah airnya. Apalagi dengan bikin kontes pemuda-pemudi memasak makanan lokal, dengan juri dari si pemasak orang kampung.

Begitulah, sekadar panorama metodologis yang dapat merangsang usaha-usaha perbaikan pendidikan, yang memberi kesempatan bagi pemuda-pemudi untuk menjadi pemimpin yang memperjuangkan dan merawat tanah airnya.



Foto suasana Taman Siswa Jakarta pada 1946. (Sumber: Perpusnas)

V

Sebagai penutup, saya akan kembali ke pesan utama tulisan ini: sekolah-sekolah kita perlu didekolonisasi, dan diisi oleh gagasan dan rintisan kembali merawat dan mengurus tanah air, dengan benar-benar menimbang sejarah dan geografi mulai dari masing-masing kampung/desa, lalu kawasan, lalu pulau, hingga mengurus kembali Indonesia sebagai bangsa agraris sekaligus maritim terbesar di dunia. Ini adalah ekspresi dari suatu kesadaran kritis dan sekaligus semangat mengubah nasib.

Saya undang: Marilah kita, terutama para pemuda dan pemudi, menjadi pandu tanah air, merintis dan membangun arus balik dengan menjadikan tempat kita berasal/kampung/desa atau apapun nama setempat, sebagai tempat berangkat dan sekaligus tempat kita mengabdikan.

Saya jadi ingat pada kata-kata utama dalam teks lagu kebangsaan Indonesia Raya sepenuhnya. Perhatikan seluruh lirik lagu itu yang terdiri dari tiga stanza. Perhatikanlah bait-bait pertama dari tiap stanza, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Karena "Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku", maka "di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku" (dari bait pertama dari stanza pertama); Karena "Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya", maka "di sanalah aku berdiri untuk selamanya" (dari bait pertama dari stanza kedua); dan karena "Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti," maka "di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sehati" (dari bait pertama dari stanza ketiga). Lihat persandingan tiap-tiap stanza.

Lirik Lagu Kebangsaan Indonesia Raya versi resmi
(dengan Ejaan Yang Disempurnakan)

I

Indonesia tanah airku,
Tanah tumpah darahku,
Di sanalah aku berdiri,
Jadi pandu ibuku.

Indonesia kebangsaanku,
Bangsa dan tanah airku,
Marilah kita berseru,
Indonesia bersatu.

Hiduplah tanahku,
Hiduplah negriku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya,
Bangunlah jiwanya,
Bangunlah badannya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrain:

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya!

II

Indonesia, tanah yang mulia,
Tanah kita yang kaya,
Di sanalah aku berdiri,
Untuk slama-lamanya.

Indonesia, tanah pusaka,
P'saka kita semuanya,
Marilah kita mendoa,
Indonesia bahagia.

Suburlah tanahnya,
Suburlah jiwanya,
Bangsanya, Rakyatnya, semuanya,
Sadarlah hatinya,
Sadarlah budinya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrain:

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya!

III

Indonesia, tanah yang suci,
Tanah kita yang sakti,
Di sanalah aku berdiri,
N'jaga ibu sejati.

Indonesia, tanah berseri,
Tanah yang aku sayangi,
Marilah kita berjanji,
Indonesia abadi.

S'lamatlah rakyatnya,
S'lamatlah putranya,
Pulaunya, lautnya, semuanya,
Majulah negrinya,
Majulah pandunya,
Untuk Indonesia Raya.

Refrain(2x)

Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Tanahku, negriku yang kucinta!
Indonesia Raya,
Merdeka, merdeka,
Hiduplah Indonesia Raya

Jakarta 19 April 2017





Foto kiri dan kanan: Suasana Taman Siswa Jakarta pada 1946.
(Sumber: Perpusnas)





Foto suasana Taman Siswa Jakarta pada 1946. (Sumber: Perpunas)





Foto suasana Taman Siswa Jakarta pada 1946. (Sumber: Perpusnas)

Membangun Daya Padu

Setyo Ramadi

*Pencinta Alam & Praktisi Pendidikan Berbasis Kegiatan Alam
Terbuka*

"Kebudayaan adalah perjuangan manusia untuk hidup bersama alam dan zamannya" Ki Hajar Dewantara

Menjelang ulang tahun yang ke-72, Negara Kesatuan Republik Indonesia masih berjuang untuk menghadirkan tata nilai dalam kehidupan bernegara bagi masyarakatnya. Potensi yang ada, karena memiliki berbagai sumberdaya alam dan suku bangsa, belum mampu menjadikan Indonesia menemukan "Indonesia Raya" yang menjadi visi bangsa Indonesia sejak merdeka.

Setelah dilantik sebagai Presiden RI yang ketujuh, Joko Widodo dalam banyak kesempatan menyebutkan peningkatan daya saing sebagai salah satu kunci kemajuan bangsa Indonesia. Meningkatkan daya saing berarti meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak bangsa dengan berbagai latar belakang budaya yang tumbuh karena lingkungan alamnya. Keragaman kebudayaan ini membutuhkan keberagaman model dan kurikulum pendidikan. Kalaupun ada dasar persamaannya, Ki Hajar Dewantara mengemukakan dua hal yang utama: *kemerdekaan dan kodrat alam*. Kemerdekaan yang menghidupkan dan menggerakkan kekuatan lahir dan batin, serta kodrat alam sebagai pijakan untuk mencapai kemajuan.



Tampak Ki Hadjar Dewantara dan Muh. Hatta sedang mendengar pidato Soekarno pada Kongres Pendidikan di Solo pada April 1947. (Sumber: Perpusnas)

Pendidikan sebagai Penyadaran Keunggulan Komparatif

Datangnya sukses dan berdaya saing bukan hanya diperoleh lantaran menang dalam persaingan kompetisi, salah satu contoh adalah upaya pendakian gunung. Reinhold Messner, pendaki gunung asal Tyrol, kota kecil di perbatasan Italia dan Jerman, telah sukses mencapai puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest (8884 meter di atas permukaan laut), seorang diri tanpa tabung oksigen. Messner dalam sebuah wawancara mengatakan, bahwa dia tidak menjadi sukses dalam bidangnya karena lebih besar atau lebih cerdas daripada yang lain. Tidak! Dia menjadi sukses karena dia memiliki kemauan untuk gagal dan untuk mencoba lagi, lagi, dan lagi. Messner juga menambahkan "Saya ingin menghapus semua kompetisi di kegiatan alam terbuka. Kompetisi bukan hal yang penting. Yang penting adalah bagaimana belajar berperilaku dengan alam liar". Messner meraih keberhasilan dalam petualangan pendakian gunung dengan cara berkompetisi dengan dirinya sendiri, membangun budaya kerja sendiri, yaitu belajar beradaptasi, berperilaku menyesuaikan diri dengan kondisi alam semesta.

Buah pengalaman Messner ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Guru Bangsa kita, Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa kebudayaan adalah perjuangan manusia untuk hidup bersama alam dan zamannya. Indonesia harus menemukan perjuangan hidupnya sendiri dan tidak perlu

terjebak dalam *permainan kalah-menang* dengan negara-negara lain, karena bangsa Indonesia menempati lingkungan alam yang berbeda dengan negara lain. Di awal kemerdekaan Indonesia, para Guru Bangsa telah mampu merumuskan landasan bagi kehidupan bernegara kita, yang menempatkan Indonesia sebagai arah dan tujuan hidup berbangsa dan bernegara, dan memilih kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai motto yang mewakili keseluruhan strategi kebudayaan kita. Mereka telah menempatkan suatu tata nilai yang diyakini dapat mengantarkan kita menggapai kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Di dalam kata *bhinneka tunggal*, keberagaman yang menyatu, dapat kita maknai sebagai pesan untuk membangun sesuai dengan keunggulan komparatif di tiap-tiap wilayah di Tanah Air Indonesia, sekaligus mengandung pesan kepada kita untuk bersatu-padu mengemasnya dalam satu kesatuan sebagai inti kekuatan.

Kita dapat melihat dengan kaca mata berbeda-beda untuk sebuah pencapaian kemajuan atau kesuksesan. Contoh lain adalah ketika Joko Widodomencalonpresidendan kemudianterpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ketujuh. Kita dapat melihat bahwa Jokowi telah mampu mensosialisasikan keunggulan komparatifnya dengan baik: sederhana, jujur, bersih, pro-rakyat, dan pekerja keras. Padahal kalau dibandingkan dengan kandidat lain, maka Jokowi bisa dibilang kalah potensi: kalah ganteng, kalah kaya, kurang



Ki Hajar Dewantara berdiri di belakang Ir. Lobo yang sedang menyampaikan sambutan peringatan ke-44 Hari Kebangkitan Nasional di Istana Merdeka, 20 Mei 1955. (Sumber: Perpusnas)

dukungan partai, dan dianggap kurang pengalaman untuk pengelolaan lembaga pemerintahan, karena Jokowi “cuma” pernah menjabat walikota. Jokowi telah sukses mengolah keunggulan komparatifnya sedemikian apik hingga menjadi kekuatan yang berdaya saing tinggi. Ternyata untuk memiliki daya saing, yang diutamakan adalah kemampuan untuk memahami dan mengolah potensi diri sendiri.

Hal ini klop dengan apa yang dipaparkan oleh Renée Mauborgne dan W. Chan Kim dalam bukunya yang berjudul *Blue Ocean Strategy* yang terbit pada 2005. Mereka menyuguhkan cara-cara bagaimana membuat Ruang Pasar tanpa kompetisi dan membuat persaingan menjadi tidak relevan. Mereka justru menyarankan untuk tidak masuk pada pasar yang sudah ramai, tetapi lebih banyak upaya untuk menciptakan produk yang kreatif, yang belum pernah ada, yang membuat kita tidak pusing dengan kompetisi atau persaingan.

Inilah cara-cara sukses berdaya saing tinggi tanpa harus harus berlomba berupaya mengalahkan kemampuan pihak lain. Yang dilakukan adalah menemukan keunggulan komparatif dan mengolahnya menjadi berdaya saing tinggi. Bagi bangsa Indonesia, yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk menciptakan model dan susunan kurikulum pendidikan yang tepat bagi sumberdaya manusia Indonesia dengan latar belakang keunggulan komparatif sumberdaya alam kita.





Prof. Dr. Sarjito selaku presiden Universitas Gajah Mada sedang menguraikan argumentasi atas promosi penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara. Tampak Presiden Soekarno duduk di sebelah Ki Hajar Dewantara pada 1956.

(Sumber: Perpusnas)

Yang menjadi pertanyaan adalah: masihkah kita berupaya menciptakan model dan kurikulum pendidikan yang seragam di seluruh Tanah Air Indonesia?

Pendidikan Melek Tuan Rumah

Tujuan pendidikan semestinya tidak saja membuat anak bangsa melek huruf dan melek profesi, tetapi juga melek tuan rumah. Sikap tuan rumah itu seperti halnya kita mengenali, memahami, berwenang dan menyayangi barang-barang, hal-hal dan keadaan di rumah kita sendiri. Kita mengenali seluk beluk rumah kita, berdaulat atas lingkungan hidup, hutan-hutan dan lautan kita sendiri. Pendidikan yang menjadikan kita melek sebagai tuan rumah penting untuk menjaga kedaulatan rakyat dan negara atas harta dan kekayaan alam yang kita miliki. Melek tuan rumah akan mendorong masyarakat melakukan pengembangan lingkungan hidupnya sendiri, tanpa menunggu bantuan. Sekalipun tidak ada uang, masyarakat akan memelihara dan memperindah lingkungan hidupnya, dengan cara apapun, karena masih memiliki tenaga dan pikiran untuk bekerja dan berkarya.

Penghargaan kepada para peneliti di hutan dan lautan kita juga masih sangat minim. Kita belum dapat menjumpai stasiun penelitian yang mapan di seluruh Taman Nasional kita. Padahal dari sana lah semestinya sumber dari

seluruh program kesejahteraan bagi masyarakat sekitar hutan dihasilkan. Dari sana lah program pendidikan bagi anak bangsa disusun. Dari sana lah rencana kebudayaan baru, perjuangan manusia untuk hidup dengan alam lingkungannya di masa depan dikembangkan. Merekalah yang dapat menghasilkan sumber ilmu pengetahuan bagi bangsa Indonesia di masa depan.

Jangankan fasilitas stasiun penelitian dan anggaran yang memadai, sudah sering kita mendengar bagaimana nasib para peneliti kita yang kurang dihargai. Mereka bekerja di hutan-hutan sendiri, bekerja keras meneliti dan menulis laporan penelitian, tetapi kemudian nama yang muncul bukanlah nama mereka, melainkan peneliti lain, baik lokal maupun asing. Seperti telur mata sapi saja: ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama.

Para peneliti berperan penting bagi perencanaan kebudayaan bangsa Indonesia. Hasil karya mereka sangat dibutuhkan untuk membuat kita menjadi melek dengan potensi kekayaan alam yang kita miliki untuk membangun daya saing berdasarkan keunggulan komparatif dari bangsa-bangsa lain di dunia.

Melek tuan rumah juga menjadi landasan bagi upaya membangun kepariwisataan Indonesia. Dengan menyadari bahwa pariwisata “hanya” menumpang di atas praktik-praktik kebudayaan yang berjalan baik, maka masyarakat diajak untuk membangun dasar utama pariwisata, yaitu cara

hidup sehari-hari mereka, kebudayaan mereka. Pariwisata adalah mengembangkan nilai tambah dari kebudayaan mereka: membangun nilai tambah dari harmoni kehidupannya, nilai tambah dari pertaniannya, dan nilai tambah dari pengelolaan secara arif hutan serta lautnya.

Karena masyarakat melek tuan rumah, Indonesia akan memiliki keragaman produk dan destinasi wisata. Masyarakat akan mengembangkan produk berdasarkan keunikan daerahnya sendiri-sendiri, yang dapat membuat wisatawan tertarik untuk bergerak dari satu pengalaman ke pengalaman yang berbeda. Produk wisata yang memberi rasa dan pengalaman mewah pada seluruh panca indera tamu-tamu dengan sajian khas berselera tinggi. Sajian kesenian masyarakat yang berasal dari kekhusyukan dan doa menjelang musim tanam. Kesenian masyarakat yang dihasilkan dari kegembiraan keberhasilan panen mereka. Sehingga pariwisata Indonesia akan bisa berteriak menjajakan: "Ayo mister! Experiencing Borneo, Experiencing Celebes, Experiencing Papua, Sumatera, Java! Ayo mister, Experiencing Indonesia!"

Pendidikan melek tuan rumah diperlukan untuk memaknai daya saing secara tepat. Sungguh celaka kalau persaingan dimaknai sangat sempit, di mana sumberdaya manusia Indonesia diletakkan hanya dalam bingkai kemampuannya meningkatkan produktivitas barang dan jasa semata.



Foto bersama sesudah pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada Ki Hajar Dewantara oleh Senat Universitas Gajah Mada di Pagelaran Kraton Yogyakarta pada 19 Desember 1956. (Sumber: Perpusnas)

Apa gunanya bila mereka harus berkompetisi dengan sumberdaya manusia negara lain, tetapi buntut-buntutnya setelah mereka menang malah membesarkan perusahaan milik bangsa lain?

Pendidikan Membangun “Daya Padu”

Indonesia telah dianugerahi lingkungan hidup yang kaya raya. Mungkin ini sebabnya kita lebih mengembangkan sikap-sikap berbagi daripada sikap-sikap bersaing seperti halnya bangsa-bangsa lain yang memiliki keterbatasan sumberdaya alamnya. Kita lebih mengembangkan kegembiraan gotong-royong, daripada kerja sendiri-sendiri. Dan kita juga lebih mengembangkan budaya nongkrong untuk bertukar pendapat, berbagi visi dan dalam pengambilan keputusan. Barangkali inilah gambaran bagaimana hubungan kita dengan alam telah mempengaruhi cara-cara hidup dan kebiasaan kita dalam membangun relasi antar manusia.

Dalam membangun dan meningkatkan keunggulan komparatif dari negara lain, hendaknya kepada masyarakat yang didorong bukanlah bersaing satu sama lain, bukan daya adu, melainkan **daya padu**: kemampuan berorganisasi, kerjasama, bersepakat, gotong-royong, menghargai keberagaman, menghargai kepemimpinan, selaras menyatu dan saling menguatkan. Membangun daya padu berarti memberikan kesempatan luas kepada anak-anak kita belajar berorganisasi sesuai dengan

minat mereka: *marching band*, paduan suara, sepak bola, Pramuka, pencinta alam, dan sebagainya, yang mendidik anak-anak kita membangun cita-cita bersama, melatih anak-anak kita memimpin dan dipimpin serta belajar mengambil keputusan. Ini bukan ekstra atau bonus kurikuler. Ini adalah bagian dari makanan pokok pendidikan kita. Jadi, buatlah anak-anak kita lapangan olahraga dengan segenap rutinitas. Fasilitas mereka dengan pusat-pusat kesenian dengan segenap pelatihnya, dan ajari mereka integritas: bertanggungjawab pada kepentingan yang lebih tinggi, sehingga kelak mereka tahu apa itu amanat rakyat dan tidak berkhianat pada rakyat.

Maksud hati ingin meningkatkan daya saing, tetapi ironisnya praktik-praktik dalam dunia pendidikan kita justru menunjukkan persaingan antar kita sendiri. Persaingan hanya sebatas ukuran angka-angka, bukan kualitas kemanusiaan anak didik. Orangtua dipaksa bersaing secara materi, untuk dapat mendapatkan sekolah terbaik bagi anak-anaknya. Guru-guru sibuk belajar bahasa Inggris atas nama mengejar daya saing internasional, dan sekolah-sekolah mengejar nilai tinggi bagi siswanya, sehingga harus melakukan remedial berkali-kali dan bahkan bila perlu kasih contekan demi mengejar 100% kelulusan.

Pendidikan juga telah dianggap semacam hitung-hitungan dagang yang harus secepatnya terbayar kembali. Karena itu kejar kelulusan, kejar pekerjaan, cari uang, kembalikan biaya belajar yang





Ki Hajar Dewantara dan Nyonya R.A. Sutartinah pada 1957.
(Sumber: Perpusnas)

mahal itu. Akibatnya anak-anak sudah tidak lagi mempunyai cukup waktu untuk bahagia: membaca buku yang mereka sukai, menekuni olahraga yang diminati, mengungkapkan rasa-merasa-nya lewat kesenian, apalagi melakukan perjalanan mengenali ragam masyarakat dan lingkungan alam Indonesia.

Salah kaprah “meningkatkan daya saing” ini jangan sampai membebani anak-anak, sekolah-sekolah, guru-guru, dosen-dosen dan para orang tua. Jangan sampai jadi *teroris* yang memicu persaingan tidak sehat di antara mereka sendiri. Daya saing adalah semata hasil dari bagaimana rencana kita membangun budaya kerja melalui pendidikan dan praktik-praktik sehari-hari dalam kehidupan bernegara. Jangan biarkan anak-anak kita terperangkap dalam kurungan sistem dan strategi pendidikan nasional yang membuatnya tidak cukup waktu untuk bahagia dan bangga dengan lingkungan alamnya sendiri.

Pendidikan Bangga Bahasa Indonesia

Banjir istilah-istilah keren yang muncul ke kosakata kita, tanpa kita sadari telah membuat kita selalu “merasa tertinggal”. Kata-kata semacam *competency*, *green investor*, *enterpreneurship*, *ecotourism*, membuat kita merasa tertinggal, gagap dan bodoh terus menerus. Akibatnya kita terima saja semua standar yang dibangun oleh pihak lain, yang belum tentu memberi manfaat lebih besar kepada bangsa dan negara kita sendiri.



Presiden Soekarno membesuk Ki Hajar Dewantara yang sedang terbaring sakit pada 1959. (Sumber: Perpusnas)

Di tahun 90-an kita telah mendengar istilah standar kompetensi yang mulai digunakan dalam menata dan mengembangkan sumberdaya manusia organisasi perusahaan di Indonesia. Belakangan kurikulum pendidikan kita juga telah menggunakan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Hari-hari ini pun masih kita mendengar di berbagai departemen sedang berupaya menyusun standar kompetensi.

Tetapi sampai hari ini, kita masih saja mendengar keluhan guru-guru dalam upaya menerapkan proses belajar mengajar berbasis kompetensi. Entah sampai kapan kebingungan mereka akan selesai. Sangat jelas bahwa kendala bahasa adalah salah satu faktor yang membuat kelambanan melakukan perubahan itu. Bahasa yang digunakan dalam standar kompetensi seringkali tidak memiliki padanan yang tepat dalam Bahasa Indonesia. Mereka lebih memahami istilah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta perilaku daripada istilah-istilah keren seperti *hard-skills* dan *soft-skills*. Haruskah kita membuang-buang waktu begitu lama untuk ini?

Bahasa menunjukkan bangsa. Mengapa Black Coffee lebih mahal dari Kopi Hitam? Mengapa kita harus mengeluarkan kocek lebih besar untuk rumah yang di papannya tertulis "for rent" daripada yang "disewakan"? Mengapa kita menggunakan istilah busway dan bukan jalur bus? Mengapa kita tidak menggunakan kata "masuk dan keluar" tapi "in dan out" untuk papan rambu di pusat perbelanjaan?

Upaya memperbaiki penggunaan Bahasa Indonesia sangat penting bagi bangsa kita yang ingin membangun jati diri. Bahasa Indonesia harus hadir dan hidup di antara kita, karena kita sadar akan kekuatan bahasa dalam menggalang “rasa hidup” berbangsa. Pemerintah perlu untuk mendorong penggunaan Bahasa Indonesia di area publik, dan menciptakan pelajaran Bahasa yang terstruktur, terarah kepada perencanaan kebudayaan Indonesia di masa depan. Memperbaiki pendidikan Bahasa Indonesia adalah salah satu upaya kita untuk membangun bangsa yang mandiri dan percaya diri, sebagai syarat menjadi bangsa yang berkesiapan “berkelahi untuk menang”.

Pendidikan Tata Nilai Bhinneka Tunggal Ika

Membangun kebudayaan Indonesia di masa depan harus mewujudkan pada cara-cara kita menyelenggarakan pendidikan hari ini. Kalau melihat karya-karya agung semacam Borobudur, menyimak cerita rakyat semacam Sawerigading, membaca sejarah kebesaran kerajaan Maritim Wilwatikta, dan kecerdasan dari tokoh-tokoh di masa kemerdekaan, dan inspirasi lainnya dari sejarah kita, maka pendidikan karakter anak bangsa Indonesia semestinya menempatkan 3 (tiga) hal ini sebagai yang utama: *daya cipta, daya juang, dan daya padu*. Meningkatkan daya cipta yang menggunakan pikiran, kehendak dan rasa untuk mencari penemuan-penemuan dan solusi terbaik hidup bersama alam lingkungan Indonesia. Membangun daya juang yang membuat kita memiliki

semangat pantang menyerah dan komitmen (memberikan waktu, tenaga, kemampuan) pada kerja-kerja yang membawa perubahan atas realitas diri dan masyarakat Indonesia, dan daya padu yang menjadikan kita bangga atas keunikan kita, menghormati perbedaan, dan mendorong kita memiliki tata organisasi dalam semangat tumbuh dan maju bersama.

Kebudayaan Indonesia adalah kumpulan saripati dari berbagai kebudayaan di tanah air. Di dalam Kebudayaan Bhinneka Tunggal, kita tidak lagi memisahkan kebudayaan pinggiran atau tengahan, apalagi kebudayaan sampingan, kebudayaan bawahan, kebudayaan dalaman, dan yang sejenisnya, yang justru dapat membuat jarak antara yang berbeda-beda, desa dengan kota, Islam dengan Kristen, Ambon dengan Jawa, dan hutan dengan lautan. Kita belajar dari sejarah jalur rempah yang dapat kita maknai sebagai hubungan yang harmonis antara kebudayaan hutan dan kebun serta lautan kita.

Khusus dalam hal pengembangan daya cipta, Ki Hajar Dewantara telah menggagas prakarya sebagai pelajaran yang penting. Karya berbeda dengan kerja. Karya melibatkan cipta, rasa dan karsa, karena itulah siswa dibebaskan menciptakan sesuatu menurut rasa dan karsanya sendiri. Siswa memiliki kebebasan penuh untuk mengembangkan daya ciptanya sendiri, guru membantu proyek karya siswa dengan sarana dan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan.



Peserta asal Irian Barat (Papua) berada di barisan paling depan dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Olah Raga Senayan pada 2 Mei 1964. (Sumber: Perpusnas)

Kalau pendidikan kita mengembangkan model pendidikan yang memerdekakan, yang membuat melek tuan rumah, yang akan mendorong tumbuhnya daya cipta, daya juang, dan daya padu, maka bolehlah para pakar sosial, pakar lingkungan hidup dan pakar ekonomi kita bersatu padu menghitung ulang proyeksi-proyeksi ekonomi, dan mulai menghitung sumber-sumber kekuatan kreatif kita dalam menciptakan nilai tambah sumberdaya alam kita. Hitung-hitungan yang memberi nilai dan penghargaan pada keringat petani dan nelayan sebagai investasi, yang menilai keteguhan hati dan kecakapan kita untuk melindungi kekayaan alam sebagai keunggulan komparatif Indonesia.

Saya berharap, pemerintah dapat memperjelas arah pendidikan kita menuju cita-cita Indonesia dan lebih memperkuat pendidikan Kebudayaan Bhinneka Tunggal di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan apapun di masyarakat. Saya pun percaya, masyarakat di seluruh pelosok tanah air yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara akan mau menambah waktunya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya hingga lengkap sampai akhir stanza ketiga:

.....Slamatlah Rakyatnya Slamatlah
putranya
Pulaunya lautnya semuanya
Majulah Negrinya Majulah Pandunya
Untuk Indonesia Raya.

Dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat Indonesia di pergaulan dunia, maka kita boleh bangga memperkenalkan kebudayaan Bhinneka Tunggal sebagai budaya Bangsa Indonesia. Menyebarkannya dengan rasa yakin dan bangga. Pejabat negara lebih berani dalam mendorong rasa saling hormat antar bangsa. Negara bisa menghentikan eskalasi “upaya menguasai” dari suatu kelompok kepada kelompok lain, baik suku, ras, golongan maupun agama. Jadi kalau di Indonesia masih ada kelompok yang menyerang kelompok lain, itu bisa diartikan kelompok itu menolak untuk turut serta membangun kebudayaan Bhinneka Tunggal dan mencederai tata nilai kita, tata nilai yang menganggap letak kekuatan bangsa Indonesia justru berada di keberagaman kita.

Ya. Kita masih dan akan terus memerlukan keteladanan dari para pemimpin, para Guru Bangsa yang menunjukkan rasa percaya diri mereka, bahagia dan bangga sebagai Bangsa Indonesia, yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang sejajar dengan bangsa lain. Mari kita menulis kembali sejarah dan pemikiran para Guru Bangsa kita, mengajarkan tata nilai Bhinneka Tunggal kepada anak-anak kita.

Anak-anak kita akan belajar membangun cita-cita, rasa bangga sebagai anak bangsa Indonesia dari Soekarno.

Anak-anak kita akan belajar kerendahan hati dari Mohammad Hatta.

Anak-anak kita akan belajar keteguhan hati dan integritas dari Badaruddin Lopa dan Hoegeng.

Anak-anak kita akan belajar kesabaran, patriotisme dan rasa cinta tanah air dari Soedirman.

Anak-anak kita akan belajar toleransi dari Nurcholis Madjid dan Gus Dur.

Anak-anak kita akan belajar mengungkapkan rasa merasanya dari Chairil Anwar

Anak-anak kita akan belajar sportifitas, ketekunan dan ketangguhan seorang Rudi Hartono dan Susi Susanti.

Anak-anak kita akan belajar disiplin, ketekunan, berpikiran maju dan kreatif dari B.J. Habibie.

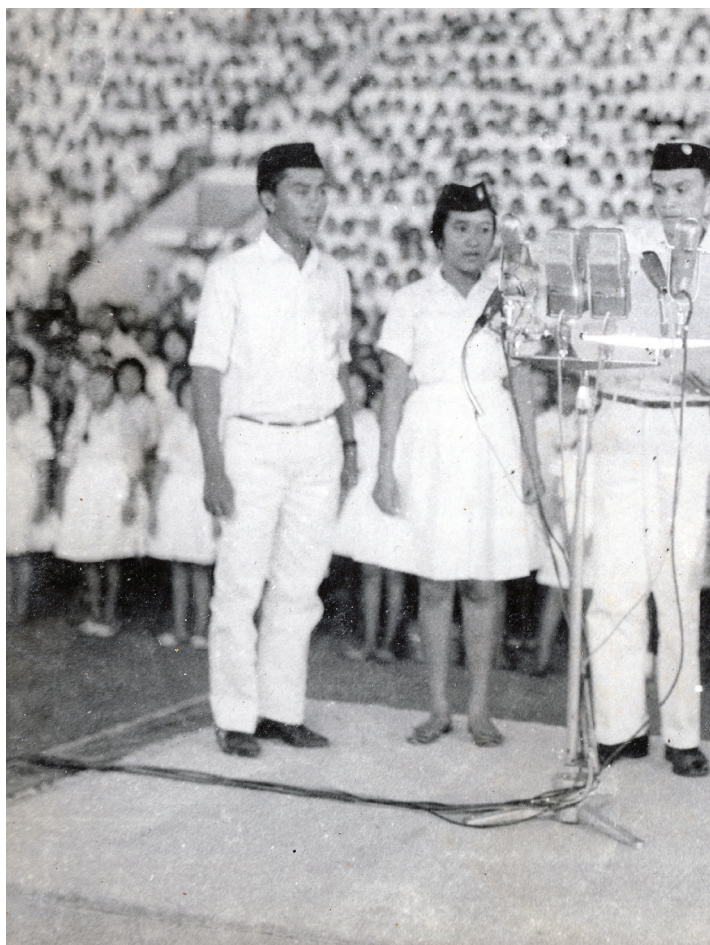
Anak-anak kita akan belajar memahami rasa bahagia dari Ki Ageng Soeryomentaram.

Anak-anak kita akan belajar memahami integritas, tanggungjawab pada kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi, dari berbagai tradisi dan budaya bangsa-bangsa di tanah air.

Kurikulum Pendidikan berperan penting dalam membentuk karakter anak bangsa menjadi pembentuk kebudayaan nasional di masa depan. Kebudayaan Nasional adalah “puncak-puncak dan sari-sari kebudayaan yang bernilai di seluruh kepulauan, baik yang lama maupun ciptaan baru,

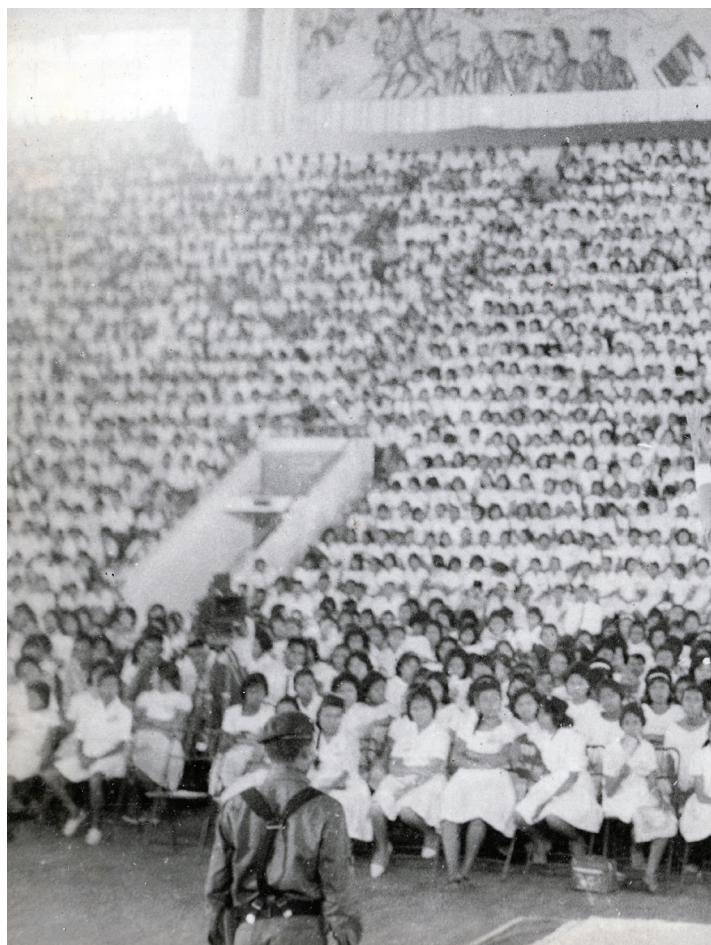
yang berjiwa nasional". Dengan mempelajari sejarah dan memahami rencana kebudayaan. Anak-anak kita akan belajar dan membangun **daya cipta, daya juang** dan **daya padu**. Dan walaupun kita masih merasa asing dengan kata daya padu karena tidak ada didalam kamus besar Bahasa Indonesia, kenapa kita tidak menciptakannya?

Lampung-Jakarta 2017





Peserta Upacara peringat Hari Pendidikan Nasional sedang menyanyikan lagu kebangsaan di Istana Olah Raga Senayan pada 2 Mei 1964. (Sumber: Perpusnas)





Presiden Soekarno memberikan pidato sambutan peringatan Hari Pendidikan Nasional di Istana Olah Raga Senayan pada 2 Mei 1964. (Sumber: Perpusnas)

Gerakan Pendidikan Perempuan Muslim

Neng Dara Affiah

Pengasuh Pondok Pesantren Annizhomyyah, Banten

Inilah keadaan yang nyata, yang hak dan yang sebenarnya harus menjadi penunjuk jalan untuk sekalian orang, yang wajib memikirkan soal perempuan. Ki Hadjar Dewantara, 1928

Sejarah gerakan perempuan Muslim adalah sejarah pendidikan. Lihat misalnya perjuangan yang dilakukan oleh Aisyiah, Muhammadiyah. Sejak didirikan pada 1917 oleh Nyai Ahmad Dahlan, organisasi ini telah mendirikan ratusan sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Demikian pula gerakan-gerakan yang dilakukan secara individual. Pada 1923, Rahmah el Yunussiah (1901-1969) mendirikan Diniyyah Puteri Padangpanjang, Sumatera Barat. Sekolah agama khusus perempuan yang pertama dan moderen ini pada mulanya mempunyai 71 orang murid yang kebanyakan terdiri dari ibu-ibu muda yang sudah berumah tangga. Selama tiga jam, pelajaran yang diberikan setiap harinya adalah pelajaran ilmu agama dan ilmu alat.

Pendidikan yang dilakukan oleh Rahmah tak hanya ditujukan kepada ibu-ibu muda, tetapi juga kepada ibu-ibu yang lebih tua yang masih buta huruf. Kegiatan ini pada mulanya diikuti oleh 125 orang ibu-ibu, tetapi pada 1926 terpaksa berhenti, karena terjadinya gempa bumi.

Karena pendidikan pula, Muslimat dan Fatayat N.U. berdiri. Pada 1952, Fatayat N.U. mendirikan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga sekolah guru. Mereka pun melakukan pemberantasan buta huruf Latin (ini karena di NU saat itu banyak perempuan yang hanya bisa membaca huruf Arab, tapi tak bisa membaca huruf Latin), menyelenggarakan kursus keterampilan menjahit, menyulam, membordir, memasak dan lainnya, disamping menyelenggarakan kursus bahasa Inggris. Pada masa itu, kehadiran Fatayat NU dengan lembaga pendidikannya membawa pencerahan pada komunitas santri ini. Sesuatu yang tidak terungkap perannya dan tidak tertulis dalam sejarah mainstream.

Pada 1956, di masa pemerintahan Sukarno, pemerintah melalui kementerian agama mengadakan kursus hakim agama untuk perempuan. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbanyak yang membolehkan perempuan menjadi menjadi hakim agama yang diwariskan semasa Menteri Agama KH. Wahid Hasyim.

Gerakan Perempuan Muslim sebagai Gerakan Pendidikan tahun 1990-1998.

Meski di tengah-tengah kekuasaan yang terpusat dan represif di masa pemerintahan Orde Baru, gerakan perempuan Muslim yang berorientasi progresif muncul di tengah-tengah kekuasaan dominan sebagai 'counter culture'.



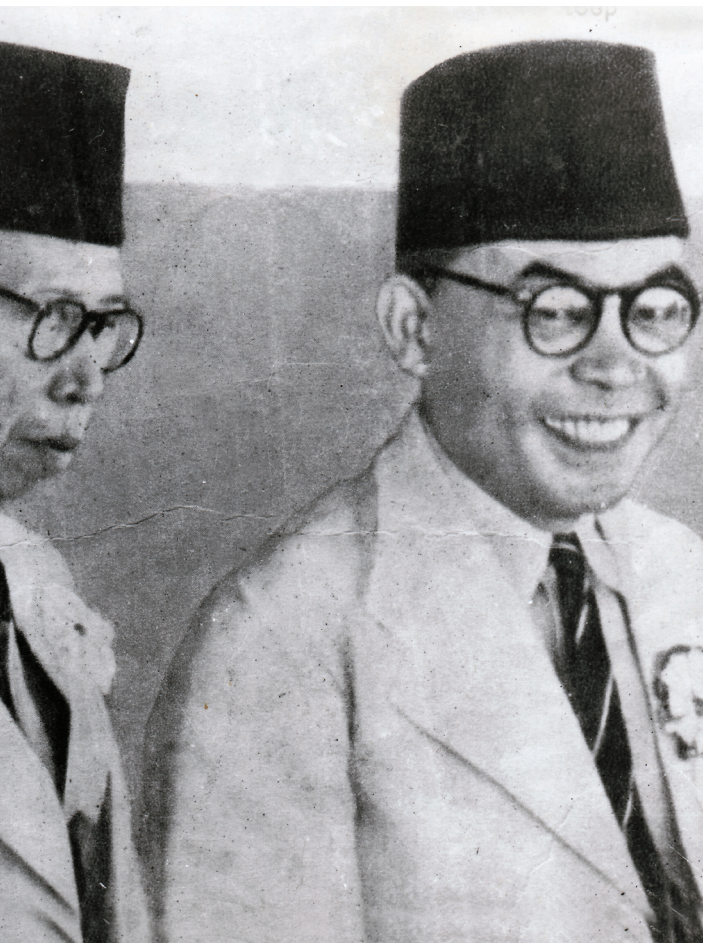


Foto bersama KH. Mas Mansur, Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Hatta. (Sumber: Perpusnas)

Dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (andragogik), gerakan perempuan ini melakukan pelbagai pelatihan, diskusi dan penelitian dengan penekanan pada keadilan gender, demokrasi dan toleransi. Kerja-kerja ini dilakukan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dengan corak organisasi kecil tapi gesit.

Organisasi-organisasi tersebut yang berada di Jakarta seperti Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang menerbitkan Jurnal Ulumul Quran yang memublikasikan sejumlah karya Muslim internasional seperti tulisan Rif'at Hassan (Pakistan), Ashgar Ali Engineer (India) dan lainnya yang memberi inspirasi bagi para intelektual dan aktifis untuk melakukan kerja-kerja penyebaran wawasan tentang pentingnya keadilan gender.

Lembaga lainnya adalah Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang mengembangkan pendidikan kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan. Lembaga ini melakukan pelbagai pendidikan bagi para pemimpin pondok pesantren, pemimpin majlis ta'lim, pemimpin sekolah agama dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Dengan melakukan pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan seperti al-Qur'an, hadis, dan pendapat-pendapat para ulama (qaul ulama) seperti yang terdapat dalam kitab-kitab kuning, pendidikan ini meninjau ulang praktik-praktik yang selama ini mendiskriminasi perempuan, seperti meninjau ulang konsep kodrat, penciptaan manusia,

kepemimpinan perempuan, praktik perkawinan poligami, pembagian hak waris, hak menentukan pasangan hidup dan lain-lain.

Sementara di Yogyakarta terdapat Yayasan Kesejahteraan Fatayat NU. Lembaga ini sesungguhnya merupakan badan otonom dalam lingkungan Fatayat NU Yogyakarta, tetapi kerja-kerja yang dilakukan cenderung terpisah dengan organisasi induknya. Dengan menggunakan analisis 'gender' sebagai titik pusat untuk melihat ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan, organisasi ini melakukan pendidikan pada jaringan-jaringan dalam internal N.U. seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Putera-Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU), para pengajar pesantren di wilayah Yogyakarta dan beberapa sekolah menengah atas di Yogyakarta. Lembaga ini menggunakan media cetak dan elektronik dalam penyebaran pengetahuannya.

Saat Indonesia memasuki era Reformasi, kerja-kerja pendidikan berbasis gender ini membuahkan 'hasil'. Di masa pemerintahan B.J. Habibie, Komnas Perempuan didirikan untuk menjawab pelbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada peristiwa Mei 1998, ketika sejumlah perempuan Tionghoa mengalami pelecehan dan kekerasan seksual.

Di masa presiden K.H. Abdurrahman Wahid dikeluarkannya kebijakan gender mainstreaming yang mengintegrasikan analisis



Kongres Pendidikan Kesenian Taman Siswa Yogyakarta, tampak Ki Hajar Dewantara sedang berpidato. (Sumber: Perpunas)

gender dalam pembangunan nasional. Kebijakan ini hendak memastikan bahwa perempuan tidak boleh ditinggalkan dan harus berpartisipasi dalam seluruh kebijakan pembangunan yang terdapat dalam semua departemen pemerintahan.

Mulai di masa itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba menerapkan kebijakan gender mainstreaming ini untuk seluruh sekolah-sekolah di bawah kementeriannya. Tetapi apakah kebijakan gender mainstreaming ini secara konsisten, sistematis dan programatis diimplementasikan oleh semua kementerian pemerintahan, maka hal tersebut harus dipantau secara serius.

Di masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri, disahkan pula Undang-Undang Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebagaimana diketahui bahwa dalam pemantauan Komnas Perempuan, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kasus ini seperti fenomena gunung es yang kurang nampak di permukaan, tetapi sesungguhnya ia merupakan persoalan serius, karena tak beraninya para istri mempersoalkan dan melaporkan apa yang ia derita, karena ketergantungan ekonomi pada suami. Selain itu juga adanya pandangan ajaran keagamaan yang mentabukan membuka aib keluarga, terutama suami.

Dengan adanya Undang-undang PKDRT tersebut, perempuan mendapatkan perlindungan hukum dan bisa mengadukan pelbagai kasus yang dialaminya ke lembaga-lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebagian besar perempuan pun mempunyai keberanian untuk mengadukan kasusnya tersebut karena telah mengenali jenis-jenis kekerasan yang dialaminya dan ada perlindungan hukum yang menjamin rasa keadilannya. Meskipun dalam praktiknya, tak semua petugas layanan dari pemerintahan seperti aparat kepolisian mempunyai sensitifitas gender, sehingga kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga kurang ditanggapi secara serius.

Kerja-kerja gerakan perempuan Muslim yang telah dilakukan di masa Orde Baru berlanjut di masa Reformasi. Adalah Rahima, sebuah lembaga yang lahir dari rahim Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) yang berdiri tahun 2000. Ia memisahkan diri dengan P3M karena mentor gerakan pendidikannya melakukan praktik poligami, sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip nilai yang selama ini dikembangkan oleh P3M.

Rahima melanjutkan kerja-kerja gerakan pendidikan yang dilakukan sebelumnya oleh P3M. Ia melakukan pendidikan dan pelatihan dengan skema hak-hak perempuan dalam Islam. Peserta pelatihannya terdiri dari pelbagai kelompok, seperti pemimpin pesantren, pemimpin majlis ta'lim, guru-guru agama tingkatan sekolah menengah atas, organisasi-organisasi mahasiswa/i yang kelak



Foto Ki Hajar Dewantara dengan pakaian narapidana (berdiri di tengah). Dari kiri ke kanan: Sismadi Sastrosiswoyo, Gatot Sastrodiharjo (Brotokesowo), R.M Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), Budi Mandoyono dan Dullatip. Kelima orang ini adalah staf redaksi dan administrasi Majalah "PANGGUGAH" milik Nationaal Indische Partij. Awalnya majalah ini dipimpin oleh Dr. Cipto Mangunkusumo di Solo. Setelah Dr. Cipto dilarang menetap di Solo, pimpinan redaksi diamanahkan kepada Suwardi Suryaningrat. (Sumber: Perpusnas)

mereka menyebarkan lagi hasil pendidikan tersebut ke dalam komunitasnya di pelbagai ceramah keagamaan, pelbagai pengajaran di sekolah dan pesantren serta organisasi-organisasi mahasiswa.

Hasil kerja yang dilakukan oleh P3M dan Rahima melahirkan anak kandung 'ideologis' kelembagaan dengan pengajaran nilai-nilai yang sama, yakni Fahmina. Organisasi ini berdiri tahun 2001 di Cirebon dengan mendasarkan pendidikan dalam tiga kerangka utama, yakni: 1) Islam dan gender; 2) Islam dan demokrasi; dan; 3) Islam dan toleransi.

Organisasi gerakan Fahmina menggunakan pelbagai media untuk penyebaran pengetahuannya. Diantaranya media cetak dan elektronik. Organisasi ini pun pada 2007 mendirikan perguruan tinggi bernama Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) yang hendak mendidik para mahasiswanya sejalan dengan visi dan misi Fahmina

Berdasarkan kebutuhan perlunya sinergi antara aktor-aktor gerakan untuk bertukar pikiran, menguatkan pengetahuan, berbagi pengalaman dan memperkuat jejaring gerakan, pada 2009, Komnas Perempuan memfasilitasi berdirinya organisasi Alimat, sebuah organisasi gerakan perempuan Muslim yang di dalamnya tergabung sejumlah ulama perempuan, kaum akademisi dan para aktifis perempuan. Organisasi ini hendak berkonsentrasi memperkuat pengetahuan perempuan dalam pelbagai disiplin ilmu, terutama

pengetahuan agama Islam, sebagai salah satu cara untuk memperkokoh gerakan pendidikan ini. Melalui organisasi Alimat ini, dipelajari data-data ketimpangan dan dikriminasi gender serta bagaimana ajaran Islam berbasis al-Quran, Hadis dan pernyataan-pernyataan ulama (qaul ulama) menjawab pelbagai permasalahan tersebut.

Berdasarkan kerja-kerja panjang yang dilakukan Rahima, Fahmina, Alimat dan sejumlah perguruan tinggi Islam tersebut, pada 25-27 April 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy, Babakan Ciwaringin, Cirebon diselenggarakan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Kongres ini mengambil tema: "Peran Ulama Perempuan dalam Meneguhkan Nilai-nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan". Kongres menghasilkan Ikrar Ulama Perempuan dan rekomendasi yang ditujukan terhadap organisasi-organisasi masyarakat dan pemerintah.

Sementara kementerian agama dalam acara penutupan kongres ini menyatakan: "Saya merasa kongres ini luar biasa. Tidak hanya substansi yang dikaji, tetapi juga prosesnya. Karena ini sepenuhnya merupakan inisiatif masyarakat dan kaum perempuan. Lalu mereka berupaya untuk membuat satu kongres (ulama perempuan) pertama di dunia, di Cirebon ini".

Dari kongres ini, menteri agama Lukman Hakim Saefuddin mencatat 3 hal makna strategisnya:

1. Kongres ini berhasil memperjuangkan keadilan

dalam relasi laki-laki dan perempuan, karena akan memiliki tingkat urgensi yang cukup tinggi. Seringkali ayat-ayat suci, karena pemahaman yang terbatas, langsung maupun tidak langsung mempengaruhi aspek (keadilan gender) ini;

2. Kongres ini mampu melakukan tidak hanya pengakuan tetapi juga revitalisasi peran ulama perempuan;

3. Kongres berhasil meneguhkan dan menegaskan bahwa moderasi Islam harus senantiasa dikedepankan.

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, kerja-kerja gerakan perempuan progresif adalah kerja-kerja pendidikan. Ia menyebarkan pengetahuan Islam yang inklusif, toleran, demokratis, menghormati hak-hak perempuan, menentang kekerasan terhadap perempuan dalam pelbagai bentuknya, menentang kekerasan terhadap kelompok minoritas dalam pelbagai bentuknya, sebagai suatu nilai yang dibutuhkan di masa kini dan nilai-nilai peradaban di masa mendatang.

Negara-negara dengan peradaban maju, sudah menerapkan nilai-nilai tersebut dalam praktik hidupnya. Indonesia kini harus menyambut nilai-nilai tersebut dalam praktik hidup warga negaranya dan kebijakan yang ditetapkan pemerintahannya. Sosialisasi nilai tersebut harus terus menerus diajarkan, mulai dari keluarga, pendidikan formal maupun informal, di sekolah swasta maupun pemerintah dengan sistematis dipantau dan dipastikan pelaksanaannya oleh kewenangan pemerintah.



Ki Hajar Dewantara dalam sebuah perjamuan se usai berceramah di hadapan anggota Perhimpunan Indonesia (Indische vereniging) di Den Haag, Belanda. (Sumber: Perpunas)





Ki Hajar Dewantara bersama para pengajar Perguruan Taman Siswa Yogyakarta. (Sumber: Perpunas)





Ki Hajar Dewantara sedang bersantai di kediamannya.
(Sumber: Perpusnas)



<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id>



ISBN 978-602-1289-51-8